

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)  
PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) DI JAKARTA BARAT DALAM  
MEMENUHI HAK WARGA ATAS PENDIDIKAN**

**SILVINASHA ARYANTI**

**ABSTRAK**

*Implementasi kebijakan PIP pada tingkat SD di Jakarta Barat memiliki sejumlah persoalan, sehingga dapat diartikan bahwa dalam implementasinya belum berjalan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan PIP pada tingkat SD di Jakarta Barat dilihat dari sudut pandang model implementasi kebijakan Grindle dan Hak Atas Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, serta analisis data yang dilakukan melalui pendekatan induktif. Penulis berusaha memahami objek penelitian dengan memanfaatkan teori yang relevan, lalu menghubungkannya dengan data yang diperoleh untuk merumuskan sebuah hipotesis. Model implementasi kebijakan Grindle menyoroti dua variabel utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu (1) Isi Kebijakan dan (2) Lingkungan Implementasi. Penelitian ini menemukan bahwa derajat perubahan yang diharapkan dari kebijakan PIP belum tercapai sepenuhnya karena masih terdapat kendala, khususnya dalam proses distribusi pencairan dana bantuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan pemahaman kebijakan oleh para pelaksana, khususnya pihak sekolah yang diharapkan lebih aktif dalam memberikan informasi kepada orang tua terkait prosedur pencairan. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan menunjukkan bahwa dampak dari ketidakefektifan ini menghambat pemenuhan hak atas pendidikan yang setara bagi semua anak, terutama pada siswa yang kurang mampu namun tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan.*

**Kata kunci:** *Implementasi Kebijakan, Hak Atas Pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP)*

**IMPLEMENTATION OF THE INDONESIAN SMART PROGRAM (PIP)  
POLICY AT THE ELEMENTARY SCHOOL LEVEL IN JAKARTA  
BARAT IN FULFILLING CITIZENS' RIGHT TO EDUCATION**

**SILVINASHA ARYANTI**

**ABSTRACT**

*The implementation of the Indonesian Smart Program (PIP) at the elementary school level in Jakarta Barat faces several issues, indicating that its implementation has not been optimal. This study aims to analyze the implementation of the PIP policy at the elementary school level in Jakarta Barat through the lens of Grindle's policy implementation model and the Right to Education framework. The research employs a qualitative method with a descriptive design, using an inductive approach for data analysis. The author seeks to understand the research object by applying relevant theories and linking them with the collected data to formulate a hypothesis. Grindle's policy implementation model highlights two key variables influencing the success or failure of policy implementation: (1) Policy Content and (2) Implementation Context. This study found that the expected degree of change from the PIP policy has not been fully achieved due to challenges, particularly in the distribution process of disbursing aid funds. Therefore, an evaluation and improved understanding of the policy by implementers, especially schools, are necessary. Schools are expected to be more proactive in providing information to parents regarding disbursement procedures. The implementation of the Indonesian Smart Program (PIP) in relation to fulfilling the right to education demonstrates that these inefficiencies hinder the realization of equal education rights for all children, particularly for underprivileged students who do not receive financial education assistance.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Right to Education, Indonesian Smart Program (PIP)*